

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Ketimpangan Pendapatan**

Secara umum, ketimpangan pendapatan merupakan gambaran perbedaan dalam besaran penghasilan yang mampu diperoleh setiap warga di dalam masyarakat, ini mencakup variasi dalam pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan usaha, dan investasi (Kuznets, 1955). Ketimpangan ini dapat terjadi baik dalam skala lokal maupun global, dan seringkali menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara ataupun kawasan. (Currie, 2011).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tiga prinsip utama—partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi—merupakan fondasi penting yang mendukung terciptanya distribusi pendapatan yang lebih adil. Partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah (Worldwide Governance Indicators, 2024).

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), partisipasi yang inklusif memungkinkan kebijakan publik mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok sosial, sehingga mencegah marginalisasi dan memperkecil ketimpangan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban lembaga pemerintah dan pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Teori

kelembagaan menyatakan bahwa mekanisme akuntabilitas yang kuat mendorong penggunaan sumber daya publik yang lebih efektif dan adil. Sementara itu, transparansi mencakup keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses pemerintahan, yang memperkuat kepercayaan publik dan menekan praktik korupsi (Worldwide Governance Indicators, 2024).

Ketimpangan pendapatan merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini mencakup ekonomi, karakteristik sumber daya manusia, struktur sosial, kondisi geografis, serta kebijakan publik (Dabla-norris & Kochhar, 2015).

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa kualitas tata kelola mempunyai dampak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada umumnya, peningkatan skor *governance*—terutama dalam indikator seperti stabilitas politik, rule of law, dan pengendalian korupsi—sering dikaitkan dengan penurunan ketimpangan. Misalnya, penelitian di Asia Barat Daya dan negara-negara OECD menunjukkan bahwa peningkatan *governance* secara konsisten menurunkan nilai indeks Gini, terutama melalui peningkatan efektivitas pemerintahan dan pengendalian korupsi (Blancheton & Chhorn, 2021).

Selanjutnya, studi di Asia Barat Daya dan OECD oleh menemukan bahwa semua indikator (tata kelola) *governance* memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks Gini, menegaskan perlunya lembaga yang transparan dan efektif untuk mengurangi ketimpangan (Hou, 2024).

Indeks Gini yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari World Inequality Database (WID) dengan kode indikator *Gini coefficient* (p0p100). Angka

ini menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan dari seluruh populasi, yaitu dari persentil ke-0 hingga ke-100. Semakin tinggi nilai Gini menunjukkan semakin besar ketimpangan antarindividu dalam hal penerimaan pendapatan (World Inequality Database, 2024).

Nilai Gini dibangun dari distribusi pendapatan seluruh populasi yang disusun secara berurutan dari persentil ke-0 hingga ke-100 (p0p100). Langkah pertama dalam pembentukan indeks ini adalah mengurutkan pendapatan individu atau kelompok dari yang paling rendah hingga paling tinggi, lalu menghitung persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh setiap kelompok populasi. Data ini kemudian digunakan untuk membentuk Kurva Lorenz, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif populasi (sumbu X) dengan persentase kumulatif pendapatan (sumbu Y). Semakin jauh kurva ini dari garis kesetaraan sempurna (garis diagonal  $45^\circ$ ), semakin besar ketimpangan yang terjadi (World Inequality Database, 2024).

## 2. Teori Ketimpangan Struktural

Teori ketimpangan struktural diperkenalkan oleh ekonom Argentina, Raúl Prebisch pada awal 1950-an untuk menjelaskan kesenjangan ekonomi global. Teori ini membagi dunia menjadi dua: negara pusat (*core*) yang industrialis, dan negara pinggiran (*periphery*) yang berkembang—termasuk Asia Tenggara (Edet & Adie, 2024). Prebisch berpendapat bahwa perdagangan internasional bersifat eksploitatif dan tidak seimbang, di mana negara pinggiran mengeksport komoditas primer bernilai rendah dan mengimpor manufaktur dari negara pusat, menciptakan ketimpangan pendapatan yang berkelanjutan (Love, 2022).

Ketimpangan ini bukanlah sekadar fenomena sementara, tetapi pola yang berulang dan tertanam dalam hubungan ekonomi global (Sumner, 2019). Negara-negara pinggiran menghadapi hambatan dalam meningkatkan nilai tambah, memperoleh akses teknologi maju, dan menyamai tingkat pendapatan negara pusat. Kondisi ini semakin memperdalam kesenjangan antarwilayah dan menuntut adanya intervensi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif (Milanovic, 2016). Berbagai studi terkini memperkuat relevansi teori ini dengan memperlihatkan bahwa ketergantungan struktural masih menghambat pertumbuhan inklusif di negara-negara berkembang.

### 3. Human Development Index

Pembangunan manusia atau *Human Development* merupakan pendekatan pembangunan yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990, yang menekankan pada perluasan kualitas hidup manusia, bukan semata-mata pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini berpusat pada tiga aspek utama: manusia (*people*), peluang (*opportunities*), dan pilihan (*choice*). *Human development* bertujuan memberi kebebasan bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai penting, dengan meningkatkan kemampuan (*capabilities*) dan memberikan kesempatan untuk menggunakannya. Dalam pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir pembangunan (UNDP, 2024).

Pendekatan *human development* ini berakar pada pemikiran Amartya Sen tentang kapabilitas manusia (*human capabilities*), yang menekankan bahwa

pembangunan seharusnya memperluas kemampuan individu untuk “menjadi” dan “melakukan” hal-hal yang mereka nilai penting dalam hidup (UNDP, 2024).

Sebagai bentuk pengukuran dari pendekatan tersebut, UNDP mengembangkan Human Development Index (HDI). Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, akses terhadap pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Setiap indikator dari ketiga dimensi tersebut diubah ke dalam bentuk angka antara 0 dan 1 agar dapat dibandingkan satu sama lain (UNDP, 2024).

Untuk dimensi kesehatan digunakan indikator harapan hidup saat lahir (dengan batas minimum 20 tahun dan maksimum 85 tahun). Dimensi pendidikan menggunakan dua indikator, yaitu harapan lama sekolah (0–18 tahun) dan rata-rata lama sekolah (0–15 tahun), yang dirata-ratakan secara aritmetika. Sedangkan untuk dimensi standar hidup digunakan Gross National Income (GNI) per kapita dalam dolar PPP 2017, dengan batas minimum US\$100 dan maksimum US\$75.000. Nilai pendapatan ini dihitung menggunakan logaritma natural karena kenaikan pendapatan yang lebih tinggi tidak selalu meningkatkan kesejahteraan secara sebanding—artinya, tambahan penghasilan yang besar tidak selalu berdampak besar pula terhadap kualitas hidup (UNDP, 2024).

Nilai HDI berada dalam rentang 0 sampai 1 tanpa satuan, dan semakin mendekati angka 1 berarti semakin tinggi tingkat pembangunan manusianya. Berdasarkan klasifikasi dari (UNDP, 2024), kategori HDI dibagi menjadi empat: sangat tinggi ( $\geq 0,800$ ), tinggi (0,700–0,799), sedang (0,550–0,699), dan rendah ( $<$

0,550). Indeks ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesejahteraan manusia karena mempertimbangkan dimensi non-ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan.

#### 4. Teori Modal Manusia

Dalam konteks ketimpangan pendapatan, Teori Modal Manusia yang dikembangkan oleh (Schultz, 1964) sangat relevan. Schultz berargumentasi bahwa peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan berpotensi meningkatkan kapasitas produktif seseorang yang dapat berdampak positif pada tingkat penghasilan. Peningkatan modal manusia melalui ketersediaan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai dapat membantu individu untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih menjanjikan serta meningkatkan kemampuan bersaing dalam dunia ketenagakerjaan yang mengarah pada pengurangan ketimpangan pendapatan (Schultz, 1964).

Lebih lanjut, (Becker, 1964) melanjutkan pemikiran ini dengan menekankan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan bentuk modal yang memberikan pengembalian dalam bentuk peningkatan pendapatan. Keterkaitan antara Human Development Index (HDI) dan modal manusia sangat erat dan saling memengaruhi. Ketika kualitas modal manusia meningkat, hal ini mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi individu. Dengan demikian, ketika nilai HDI dalam suatu wilayah menunjukkan peningkatan, semakin merata distribusi pendapatan yang dapat dicapai, karena kualitas hidup yang lebih baik memberikan individu kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

## 5. Kinerja Tata Kelola

Worldwide Governance Indicators (WGI) adalah kumpulan enam indikator agregat yang disusun oleh World Bank (Bank Dunia) untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan di lebih dari 200 negara dan wilayah sejak tahun 1996. Indikator ini menggabungkan berbagai data persepsi dari lebih dari 30 sumber independen, termasuk survei rumah tangga, survei perusahaan, dan penilaian ahli dari organisasi sektor publik, swasta, maupun LSM internasional (Worldwide Governance Indicators, 2024).

WGI terdiri dari enam indikator utama yang masing-masing menggambarkan aspek berbeda dari tata kelola (Worldwide Governance Indicators, 2024):

- a. Voice and Accountability – partisipasi warga negara dalam memilih pemerintahan, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers.
- b. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism – stabilitas politik dan risiko kekerasan.
- c. Government Effectiveness – kualitas pelayanan publik dan efektivitas kebijakan pemerintah.
- d. Regulatory Quality – kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang mendukung sektor swasta.
- e. Rule of Law – penegakan hukum, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepolisian, dan pengadilan.
- f. Control of Corruption – persepsi terhadap korupsi di sektor publik, baik kecil maupun besar.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada indikator Political Stability and Absence of Violence/Terrorism yang mengukur sejauh mana suatu negara mengalami ancaman terhadap stabilitas pemerintahan, termasuk risiko kudeta, kekerasan politik, dan terorisme. Indikator ini dibentuk dari data persepsi yang dihimpun dari berbagai sumber, baik survei maupun penilaian ahli, dan diolah menggunakan pendekatan statistik berbasis *Unobserved Components Model* (UCM) (Worldwide Governance Indicators, 2024).

Pengukuran tata kelola oleh Worldwide Governance Indicators (WGI) menggunakan skor distribusi normal standar (z-score) dengan rentang nilai dari -2.5 hingga +2.5. Skor ini menunjukkan posisi relatif suatu negara terhadap rata-rata global dan memungkinkan perbandingan yang konsisten antar negara dalam distribusi tata kelola global. *Unobserved Components Model* (UCM) menggabungkan berbagai sumber data tentang tata kelola pemerintahan menjadi satu indikator yang lebih akurat. Model ini bekerja dengan memisahkan lokasi kosong (yang tidak langsung terukur) dari data yang ada, dan mengestimasi tingkat tata kelola yang sebenarnya berdasarkan semua data tersebut. Parameter-parameter model, seperti bobot dari setiap sumber data dan tingkat kesalahan pengukuran, dihitung menggunakan teknik statistik tertentu. Setelah parameter dihitung, kita mendapatkan nilai terbaik dari tingkat tata kelola suatu negara, lengkap dengan *margin of error* untuk menunjukkan ketidakpastian. (Worldwide Governance Indicators, 2024).

## 6. Teori Kelembagaan

Teori Kelembagaan yang dikemukakan oleh (North, 1991) menjelaskan bahwa institusi, baik formal (aturan hukum, pemerintahan) maupun informal (nilai dan norma sosial), berperan penting dalam menentukan hasil pembangunan ekonomi. Institusi yang kuat menciptakan insentif yang baik untuk pertumbuhan, distribusi sumber daya yang adil, serta pengurangan ketimpangan. Dalam konteks ketimpangan pendapatan, teori ini menekankan bahwa kualitas tata kelola publik sangat menentukan apakah pertumbuhan ekonomi menghasilkan pemerataan atau justru memperparah ketimpangan.

Tata kelola (*governance*) bukan hanya menyangkut fungsi pemerintah (*government*), tetapi juga mencakup interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membuat dan menerapkan kebijakan publik (Katsamunsk, 2016). *Governance* yang buruk dapat memperburuk distribusi pendapatan karena menghasilkan kebijakan yang tidak akuntabel dan menutup akses bagi kelompok rentan.

Pemikiran (Stiglitz, 2016) memperluas perspektif kelembagaan dengan menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dipicu oleh pasar yang bebas, tetapi lebih disebabkan oleh institusi dan kebijakan yang dirancang untuk melayani kelompok elit. Oleh karena itu, menurutnya, tata kelola yang baik tidak hanya berarti efisiensi birokrasi, tetapi juga akses yang adil terhadap kebijakan, informasi, dan sumber daya ekonomi. (Stiglitz, 2016).

## 7. Teknologi Informasi dan Komunikasi

International Telecommunication Union (ITU) adalah lembaga khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas pengembangan standar internasional dan pengumpulan data global di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Salah satu kontribusi penting ITU adalah penyusunan berbagai indikator global, seperti *Share of Individuals Using the Internet* (UI) (International Telecommunication Union, 2025).

Indikator *Share of Individuals Using the Internet* merujuk pada individu yang menggunakan Internet dari lokasi mana pun dan untuk tujuan apa pun, terlepas dari perangkat dan jaringan yang digunakan dalam tiga bulan terakhir. Penggunaan dapat melalui komputer (misalnya komputer desktop, komputer laptop, tablet atau komputer genggam serupa), telepon genggam, mesin permainan, televisi digital, dan sebagainya. Pengukuran dilakukan pada tingkat individu, bukan berdasarkan jumlah koneksi atau langganan, sehingga mencerminkan keterhubungan aktual penduduk terhadap internet. (International Telecommunication Union, 2025).

Metodologi yang digunakan mencakup dua pendekatan utama, Pendekatan pertama adalah metode estimasi langsung berbasis bobot tertimbang dan asumsi pertumbuhan linear, yang digunakan untuk menghitung nilai agregat dengan cepat dari data yang tersedia, seperti interpolasi antar tahun atau rata-rata tertimbang antar kelompok umur dan jenis kelamin (International Telecommunication Union, 2025).

Sementara itu, pendekatan kedua menggunakan model statistik formal berupa *Ordinary Least Squares* (OLS), yang mengestimasi hubungan antara proporsi pengguna internet dan variabel-variabel penjelas seperti PDB per kapita,

tingkat urbanisasi, dan penetrasi seluler. Dalam pendekatan ini, transformasi logit juga diterapkan untuk memastikan hasil prediksi tetap berada dalam rentang 0–100 persen. (International Telecommunication Union, 2025).

#### 8. Teori Difusi Ekonomi

Teori Difusi Inovasi dari (Everett M. Rogers, 1962) menjelaskan bahwa penyebaran inovasi—dalam hal ini TIK—berjalan secara bertahap dan tidak merata di antara anggota masyarakat. Kelompok yang lebih dahulu mengadopsi teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif, baik dalam pendidikan, akses pekerjaan, maupun peluang usaha. Sebaliknya, kelompok yang lambat mengadopsi TIK akan tertinggal dan sulit bersaing secara ekonomi. Hal ini berimplikasi langsung terhadap distribusi pendapatan, karena mereka yang memiliki akses TIK yang baik akan cenderung memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Dalam masyarakat jaringan (*network society*), penguasaan informasi dan teknologi menjadi bentuk baru dari kekuasaan yang memperdalam jurang sosial (Castells 1996). Sementara itu, Norris (2001) menyoroti fenomena jurang digital (*digital divide*) yang terjadi secara global, di mana akses terhadap TIK tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur, tetapi juga oleh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kebijakan negara. Jurang digital ini menjadi salah satu penjelaras utama bagaimana ketimpangan pendapatan terus bertahan, bahkan di tengah percepatan inovasi teknologi.

## B. Keterkaitan Antar Variabel

### 1. Hubungan Antara Human Development Index terhadap Ketimpangan Pendapatan

Human Development Index dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang kompleks. Berdasarkan kajian konseptual, peningkatan Human Development Index yang meliputi aspek-aspek seperti taraf kesehatan, tingkat pendidikan, serta kualitas hidup seharusnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan kapabilitas dan produktivitas masyarakat.

Penelitian oleh (Ardiani & Prabowo, 2024) menghasilkan temuan bahwa HDI berpengaruh negatif secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan selama periode 2018–2022. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel model *Fixed Effect*, studi ini menunjukkan bahwa peningkatan HDI yang mencerminkan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup cenderung diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Hasil ini mendukung pandangan bahwa HDI yang lebih merata dapat berkontribusi dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Penelitian oleh (Vo et al., 2024) menganalisis secara mendalam mengenai pengaruh kualitas HDI (pembangunan manusia) terhadap ketimpangan pendapatan dalam perspektif temporal. Hasil analisis mengindikasikan bahwa meskipun kualitas HDI (pembangunan manusia) secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan, efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama fase perkembangan ekonomi dan pendidikan yang diterapkan.

## 2. Hubungan Antara Kinerja Tata Kelola terhadap Ketimpangan Pendapatan

Faktor krusial yang memegang peranan vital dalam menentukan tingkat ketimpangan pendapatan adalah tata kelola. Tata kelola memiliki peran penting dalam mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat melalui perumusan kebijakan publik, pengelolaan anggaran, sistem perpajakan, serta penyediaan layanan sosial.

Penelitian oleh (Moradi et al., 2021) menghasilkan temuan bahwa indeks stabilitas politik yang merupakan bagian dari indikator tata kelola memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Stabilitas politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa semakin stabil kondisi politik suatu negara, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatannya. Stabilitas politik mendorong meningkatnya motivasi investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga mendukung pertumbuhan produksi dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Penelitian (Huang & Ho, 2018) menunjukkan bahwa dampak kualitas demokratis dan kualitas tata kelola terhadap ketimpangan pendapatan adalah signifikan dan negatif di dalam kelompok ekonomi pasar yang sedang berkembang dan negara berkembang. Ini berarti bahwa peningkatan dalam kualitas tata kelola dapat berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan di kawasan tersebut.

### 3. Hubungan Antara Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Evolusi dalam TIK/ICT telah menghasilkan transformasi yang mendasar pada berbagai sektor kehidupan. Namun, di tengah kemajuan ini, muncul pertanyaan mengenai bagaimana TIK mempengaruhi ketimpangan pendapatan di masyarakat. Sementara TIK berpotensi mendorong peningkatan literasi digital, pemerataan akses ke sumber pembelajaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, ada juga risiko bahwa ketidakmerataan dalam akses dan penggunaan teknologi ini dapat memperburuk kesenjangan pendapatan.

Penelitian oleh (Kartiasih et al., 2023) menunjukkan bahwa penetrasi ponsel (*mobile cellular penetration*) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di suatu negara. Dengan menggunakan data panel lintas wilayah selama periode 2015–2019 serta pendekatan Generalized Method of Moments (GMM), studi ini menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap ponsel, maka ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Temuan ini menegaskan bahwa akses terhadap teknologi komunikasi seperti ponsel dapat menjadi alat penting dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata.

Penelitian oleh (Chen et al., 2023) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital, termasuk penggunaan Internet, memiliki efek positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar area urban dan rural. Dengan analisis panel data dari 194 kota periode 2011–2018, penelitian ini menemukan peningkatan akses

Internet justru memperlebar kesenjangan. Temuan ini menegaskan bahwa ICT tidak selalu membawa manfaat pemerataan pendapatan, terutama bila penggunaan teknologi belum didukung oleh kondisi struktural yang memadai.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh (Hossain, 2022) mengkaji peran Indeks Modal Manusia (HCI) dan Tata Kelola yang Baik (GG) dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang, khususnya pada negara berpenghasilan menengah atas (UMI) dan menengah bawah (LMI). Analisis dilakukan dengan membagi negara berdasarkan kategori penghasilan dan menggunakan koefisien Gini sebagai pengukur ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi variabel dependen, sedangkan HCI menjadi variabel independen utama yang dikombinasikan dengan indikator tata kelola meliputi stabilitas politik, kualitas regulasi, dan supremasi hukum. Hasil menunjukkan bahwa HCI tidak berdampak signifikan pada pengurangan ketimpangan pendapatan di kawasan UMI. Namun, di kawasan LMI, HCI berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ketika dipadukan dengan indikator tata kelola. Penelitian ini menekankan bahwa pengembangan modal manusia yang didukung strategi tata kelola yang efektif sangat penting untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

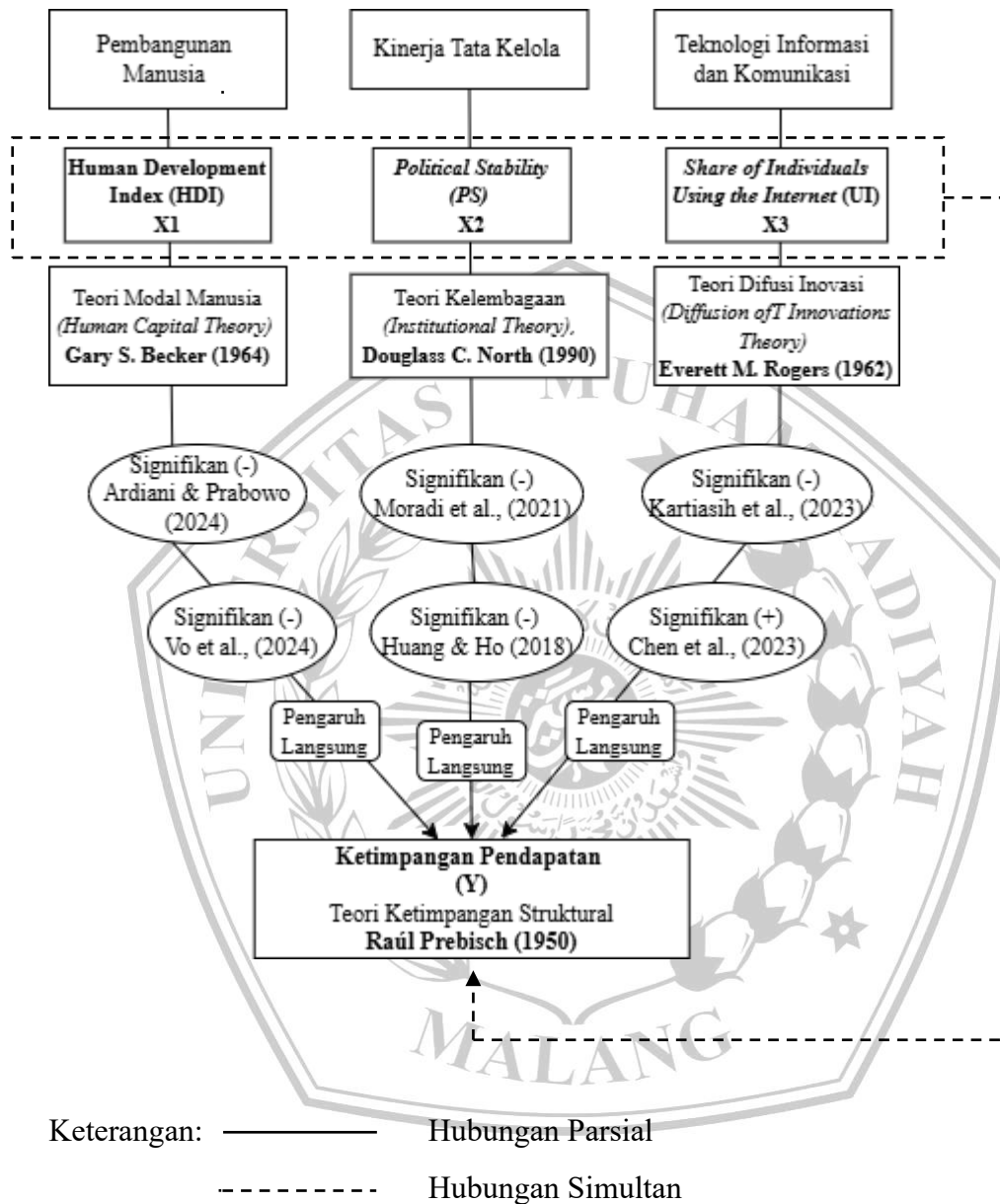
Penelitian oleh (Adams & Akobeng, 2021) meneliti dampak ICT terhadap ketimpangan pendapatan di 46 negara Afrika selama periode 1984-2018. Temuan mengindikasikan bahwa variabel TIK berkontribusi pada penurunan kesenjangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya indikator tata kelola (demokrasi, kualitas regulasi, dan stabilitas politik)

dalam memperkuat hubungan antara penggunaan ICT dan pengurangan ketimpangan. Kesimpulannya, untuk mencapai stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik, investasi infrastruktur ICT harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola yang efektif.

Penelitian oleh (Lee & Vu, 2020) mengkaji hubungan antara kompleksitas ekonomi, kapital manusia, dan ketimpangan pendapatan di berbagai negara berkembang dan maju menggunakan data tahun 1980-2014. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dengan koefisien Gini sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dengan kompleksitas ekonomi tinggi cenderung memiliki ketimpangan pendapatan rendah. Kapital manusia, khususnya pendidikan, juga terbukti berperan penting dalam menurunkan ketimpangan. Studi ini menyimpulkan bahwa kombinasi antara kompleksitas ekonomi dan pengembangan kapital manusia dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

## D. Kerangka Pikir

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan yang menjadi landasan awal dalam sebuah penelitian, di mana keabsahannya perlu diverifikasi melalui pengumpulan dan analisis data secara sistematis.

## 1. Uji-f

- H1: Human Development Index, kinerja tata kelola, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN.

## 2. Uji-t

- H1: Human Development Index berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN.
- H2: Kinerja tata kelola berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN.
- H3: Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN.

